



BAB I

PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 telah dapat disusun. Laporan Keuangan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran 2024. Dalam pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 1 Januari 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Laporan keuangan kadang kala mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyusun laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang diperlukan untuk melakukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Catatan atas Laporan Keuangan perlu dibuat dengan menyajikan penjelasan dan informasi atas seluruh akun dan sub akun pada pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai untuk memudahkan pengguna terutama Lembaga Pemeriksa dalam memahami Laporan Keuangan dapat dengan jelas dan tidak multi tafsir. Penyajian Laporan Keuangan dengan *full disclosure* sehingga akan membantu fungsi konsolidasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi untuk Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

- c. Menyampaikan informasi yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, yaitu membandingkan realisasi belanja daerah dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengetahui sisa perhitungan tahun anggaran berkenaan dan memberikan gambaran posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Organisasi Perangkat Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

B. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400)
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Pemerintah Daerah.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan PD

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan
 - 2. Belanja
- B. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
- C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 1. Pendapatan LO
 - 2. Beban
- D. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab V. Penutup



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.
- Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi realisasi anggaran dan belanja OPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- laporan keuangan Neraca, Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan pada tanggal periode akuntansi.
- Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas ekuntansi.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO koreksi yang langsung menambah ekuitas dan ekuitas akhir.
- Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan.
- Bab V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan Data Tabel Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul berdasarkan program dan kegiatan tahun 2024 :

1. Tabel Capaian Realisasi Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024

TABEL IKHTISAR CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian(Target)	Realisasi Tingkat Capaian
Nama Program	Tolok Ukur Kinerja	Satuan		
1	2	3	4	5
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Masukan Dana	Rp	283.273.000,00	272.404.038,00
	Keluaran : Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	Persen	96,16	96,16
	Belanja Unit Kerja	Rp	283.273.000,00	272.404.038,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan Dana	Rp	2.272.248.933,00	2.045.530.548,00
	Keluaran : Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	Persen	90,02	90,02
	Belanja Unit Kerja	Rp	2.272.248.933,00	2.045.530.548,00
	Masukan Dana	Rp	1.101.928.400,00	1.045.982.559,00



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Keluaran : Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persen	94,92	94,92
	Belanja Unit Kerja	Rp	1.101.928.400,00	1.045.982.559,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Masukan Dana	Rp	30.448.747.868,00	30.420.108.668,00
	Keluaran : Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	Persen	99,91	99,91
	Belanja Unit Kerja	Rp	30.448.747.868,00	30.420.108.668,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masukan Dana	Rp	68.625.000,00	48.026.400,00
	Keluaran : Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	Persen	69,98	69,98
	Belanja Unit Kerja	Rp	68.625.000,00	48.026.400,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Masukan Dana	Rp	283.009.000,00	261.504.440,00
	Keluaran : Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	Persen	92,40	92,40
	Belanja Unit Kerja	Rp	283.009.000,00	261.504.440,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Masukan Dana	Rp	365.007.300,00	300.952.250,00
	Keluaran : Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	Persen	82,45	82,45
	Belanja Unit Kerja	Rp	365.007.300,00	300.952.250,00



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

2. Tabel Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024

KEGIATAN	Rencana Tingkat Capaian(Target)			Realisasi Tingkat Capaian	Hasil Evaluasi
Nama Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja	Satuan			
1	2	3	4	5	6
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Masukan Dana	Rp	283.273.000,00	272.404.038,00	Efektif
	Keluaran : Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya	Kali	3	3	
	Keluaran : Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	Persen	96,16	96,16	
	Belanja Unit Kerja	Rp	283.273.000,00	272.404.038,00	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan Dana	Rp	83.413.900,00	81.486.750,00	Efektif
	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	Dokumen	29	29	



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Keluaran : Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan PD terhadap perencanaan pemda	Persen	97,69	97,69	
	Belanja Unit Kerja	Rp	83.413.900,00	81.486.750,00	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan Dana	Rp	1.578.380.901,00	1.557.000.979,00	Efektif
	Keluaran : Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksana	Persen	100	100	
	Keluaran : Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	98,65	98,65	
	Belanja Unit Kerja	Rp	1.578.380.901,00	1.557.000.979,00	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan Dana	Rp	10.831.900,00	8.554.568,00	Tidak Efektif
	Keluaran : Jumlah layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian terlaksana	Layanan	1,00	1,00	
	Keluaran : Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	78,98	78,98	



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Belanja Unit Kerja	Rp	10.831.900,00	8.554.568,00	Tidak Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan Dana	Rp	318.424.800,00	201.478.717,00	Tidak Efektif
	Keluaran : Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	Layanan	100	100	
	Keluaran : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran terlaksana	Persen	63,27	63,27	
	Belanja Unit Kerja	Rp	318.424.800,00	201.478.717,00	Tidak Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan Dana	Rp	179.592.032,00	95.952.255,00	Tidak Efektif
	Keluaran : Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	Layanan	6	6	
	Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Persen	53,43	53,43	
	Belanja Unit Kerja	Rp	179.592.032,00	95.952.255,00	Tidak Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Masukan Dana	Rp	101.605.400,00	101.057.279,00	Efektif
	Keluaran : Jumlah layanan	Layanan	6	6	



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Pemerintahan Daerah	pemeliharaan barang milik daerah terlaksana				
	Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam keadaan baik	Persen	99,46	99,46	
	Belanja Unit Kerja	Rp	101.605.400,00	101.057.279,00	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masukan Dana	Rp	1.101.928.400,00	1.045.982.559,00	
	Keluaran : Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya	Kali	14	14	
	Keluaran : Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	Persen	94,92	94,92	Efektif
	Belanja Unit Kerja	Rp	1.101.928.400,00	1.045.982.559,00	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika	Masukan Dana	Rp	30.448.747.868,00	30.420.108.668,00	
	Keluaran :Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	Layanan	41	41	Efektif



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Keluaran : Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	Persen	99,91	99,91	
	Belanja Unit Kerja	Rp	30.448.747.868,00	30.420.108.668,00	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masukan Dana	Rp	68.625.000,00	48.026.400,00	Tidak Efektif
	Keluaran : Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	Kali	4	4	
	Keluaran : Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	Persen	69,98	69,98	
	Belanja Unit Kerja	Rp	68.625.000,00	48.026.400,00	Tidak Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Masukan Dana	Rp	283.009.000,00	261.504.440,00	Efektif
	Keluaran : Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Kali	4	4	
	Keluaran : Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	Persen	92,40	92,40	



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Belanja Unit Kerja	Rp	283.009.000,00	261.504.440,00	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Masukan Dana	Rp	365.007.300,00	300.952.250,00	Tidak Efektif
	Keluaran : Jumlah Fasilitas Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik sosial	Layanan	28	24	
	Keluaran : Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	Persen	82,45	82,45	
	Belanja Unit Kerja	Rp	365.007.300,00	300.952.250,00	Tidak Efisien

Ikhtisar atas kinerja keuangan diatas sesuai dengan konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Berdasarkan indikator pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 tersebut ada beberapa subkegiatan yang tidak mencapai target. Untuk Subkegiatan yang tidak mencapai target 95% dari anggaran yang ditetapkan dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KET
1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	283.273.000,00	272.404.038,00	96,16



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Penjelasan	-		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.553.500,00	31.401.750,00	96,46
	Penjelasan	-		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.672.500,00	25.410.000,00	98,98
	Penjelasan	-		
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	90.000,00	87.000,00	96,67
	Penjelasan	-		
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	212.500,00	209.500,00	98,59
	Penjelasan	-		
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	212.500,00	141.000,00	66,35
	Penjelasan	Harga barang dibawah harga pagu anggaran		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.262.900,00	24.072.500,00	99,22
	Penjelasan	-		
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.000,00	165.000,00	40,24
	Penjelasan	Ada Laporan yang tidak perlu dicetak		
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.303.401,00	1.525.259.229,00	98,64



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Penjelasan	-		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	100,00
	Penjelasan			
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.477.500,00	31.141.750,00	98,93
	Penjelasan	-		
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.831.900,00	8.554.568,00	78,98
	Penjelasan	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Berkurang dari 10 Tenaga Non ASN menjadi 8 Orang, dikarenakan diterima menjadi PPPK		
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.209.000,00	4.201.400,00	99,82
	Penjelasan	-		
13	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	115.837.500,00	112.338.000,00	96,98
	Penjelasan	-		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.110.000,00	5.722.800,00	93,66
	Penjelasan	Harga barang dibawah harga pagu anggaran		
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.293.300,00	7.293.300,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Penjelasan	-		
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.080.000,00	90,00
	Penjelasan	Menyesuaikan Harga Pasar		
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.775.000,00	70.843.217,00	38,55
	Penjelasan	Beberapa anggota Forkopimda tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, karena ada Ketugasan yang tidak bisa ditinggalkan		
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.060.000,00	36.372.500,00	64,88
	Penjelasan	Belanja Jasa Tenaga Administrasi berkurang karena Personil di terima menjadi PPPK tahun 2024 sejumlah 1 Orang		
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.178.032,00	39.276.755,00	38,07
	Penjelasan	Rencana Penganggaran Untuk Pindah Kantor ada di Bulan Juli 2024 akan tetapi baru disetujui di Bulan Oktober 2024, Sehingga Anggaran Pembayaran Tagihan Listrik dan Air untuk Gedung lama dan Gedung Baru terealisasi di bulan November 2024		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.354.000,00	20.303.000,00	99,75
	Penjelasan	-		
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.857.400,00	71.582.279,00	99,62
	Penjelasan	-		

**Catatan Atas Laporan Keuangan***Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.570.000,00	11.300.000,00	97,67
	Penjelasan	-		
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.878.000,00	5.878.000,00	100,00
	Penjelasan	-		
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00
	Penjelasan	-		
25	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.001.330.900,00	945.385.163,00	94,41
	Penjelasan	Terdapat Belanja Sewa yang harga sewanya dibawah Pagu Belanja		
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.597.500,00	100.597.396,00	99,99



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	<i>Penjelasan</i>	-		
27	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36.354.700,00	32.388.500,00	89,09
	<i>Penjelasan</i>	Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Desk Pilkada karena sesuai dengan regulasi, Desk Pilkada dilaksanakan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		
28	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.412.393.168,00	30.387.720.168,00	99,92
	<i>Penjelasan</i>	-		
29	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	68.625.000,00	48.026.400,00	69,98



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Penjelasan	Belanja Jasa Tenaga Administrasi berkurang karena Personil di terima menjadi PPPK tahun 2024 sejumlah 1 Orang		
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	283.009.000,00	261.504.440,00	92,40
	Penjelasan	Kegiatan FGD Forkopimda yang tidak dilaksanakan karena : - Pimpinan DPRD Tahun 2024-2029 belum dilantik secara definitif - Bupati Melakukan cuti berkenaan dengan mencalonan diri sebagai Bupati pada Pilkada Tahun 2024		
31	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.240.000,00	1.237.475,00	99,80
	Penjelasan	-		
32	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	27.600.000,00	16.000.000,00	57,97



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Penjelasan	Kegiatan FGD Forkopimda yang tidak dilaksanakan karena : - Pimpinan DPRD Tahun 2024-2029 belum dilantik secara definitif - Bupati Melakukan cuti berkenaan dengan mencalonan diri sebagai Bupati pada Pilkada Tahun 2024		
33	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	159.912.400,00	148.609.875,00	98,36
	Penjelasan	-		
34	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.954.900,00	15.954.900,00	100
	Penjelasan	-		
35	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	160.300.000,00	119.150.000,00	74,33



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	Penjelasan	Kegiatan FGD Forkopimda yang tidak dilaksanakan karena : - Pimpinan DPRD Tahun 2024-2029 belum dilantik secara definitif - Bupati Melakukan cuti berkenaan dengan mencalonan diri sebagai Bupati pada Pilkada Tahun 2024
--	-------------------	--

Berdasarkan penjelasan ketidak tercapainnya Realisasi Belanja secara Maksimal dikarenakan :

- Terdapat perbedaan nilai belanja barang dan jasa dengan pagu anggaran yang telah direncanakan (menyesuaikan dengan harga dilapangan) sehingga terdapat sisa dari pagu anggaran belanja, sehingga realisasi pembayarannya menjadi lebih rendah pada periode APBD Tahun 2024
- Terdapat kegiatan yang melibatkan Pimpinan Daerah yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pemilu Serentak, sehingga beberapa kegiatan yang melibatkan Pimpinan DPRD tidak dapat dilaksanakan karena menunggu pelantikan Pimpinan DPRD secara definitif, selain itu adanya Pilkada Serentak Sehubungan dengan Pencalonan Bupati di Tahun 2024, Bupati Gunungkidul menjalankan cuti sehingga beberapa kegiatan Forkopimda tidak dapat dilaksanakan.



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Pos-Pos Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Berikut ini disajikan tabel Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	
5	BELANJA DAERAH	34.822.839.501	34.394.508.903	98,77
5.1	BELANJA OPERASI	34.737.839.501	34.311.833.903	98,77
5.1.01	Belanja Pegawai	1.546.303.401	1.525.259.229	98,64
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.303.401	1.525.259.229	98,64
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.192.932	2.594.231.506	86,50
5.1.02.01	Belanja Barang	730.650.500	683.359.637	93,53
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.833.093.632	1.603.916.173	87,50
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	98.042.800	97.762.479	99,71
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	337.406.000	209.193.217	62,00
5.1.05	Belanja Hibah	30.192.343.168	30.192.343.168	100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.054.880.000	29.054.880.000	100,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.137.463.168	1.137.463.168	100,00
5.2	BELANJA MODAL	85.000.000	82.675.000	97,26
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.000.000	82.675.000	97,26
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.000.000	12.575.000	96,73
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	72.000.000	70.100.000	97,36
	JUMLAH BELANJA	34.822.839.501	34.394.508.903	98,77



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Laporan Realisasi Anggaran pada Belanja menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran Tahun 2024 dengan Realisasinya, yang mencakup Unsur Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pagu Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 sebesar Rp34.822.839.501,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp34.394.508.903,00 atau dengan prosentase realisasi sebesar 98,77%.

1. PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang tidak mengelola pendapatan atau penerimaan daerah, oleh karena itu pendapatan disajikan dengan nilai nol.

	2024 (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	
b) Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	

2. BELANJA DAERAH

a. Kebijakan Akuntansi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah

2) Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban diukur berdasarkan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b) Transaksi nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehan.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan azas bruto.

b. Rincian Belanja Daerah

Dalam tahun 2024, Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintah realisasinya mencapai Rp34.394.508.903,00 atau dengan prosentase sebesar 98,77% dari total Pagu anggaran sebesar Rp34.822.839.501,00. Adapun sisa Pagu Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp428.330.598,00.

Tabel Belanja Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	
5	BELANJA DAERAH	34.822.839.501	34.394.508.903	98,77
5.1	BELANJA OPERASI	34.737.839.501	34.311.833.903	98,77
5.2	BELANJA MODAL	85.000.000	82.675.000	97,26
	JUMLAH BELANJA	34.822.839.501	34.394.508.903	98,77



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan tabel diatas tabel diatas, Penyerapannya tidak mencapai 100% dikarenakan sebagian besar pelaksanaan realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun ada beberapa realisasi anggaran belanja operasional yang tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga penyerapan tidak optimal.

Tabel Belanja Operasi

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	
5.1	BELANJA OPERASI	34.737.839.501	34.311.833.903	98,77
5.1.01	Belanja Pegawai	1.546.303.401	1.525.259.229	98,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.999.192.932	2.594.231.506	86,50
5.1.05	Belanja Hibah	30.192.343.168	30.192.343.168	100,00
	JUMLAH BELANJA	34.737.839.501	34.311.833.903	98,77

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp34.311.833.903,00 atau 98,77% dari total Pagu Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp34.737.839.501,00. Adapun rincian Belanja Operasi ini, terdiri dari :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.525.259.229,00 atau 98,64% dari total Pagu Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.546.303.401,00 dan sisa pagu yang tidak terserap adalah Rp21.044.172,00.

Belanja Pegawai terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.546.303.401	1.525.259.229	98,64
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.303.401	1.525.259.229	98,64
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	-	



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 yaitu 22 pegawai, yang terdiri dari 20 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun persentase realisasi belanja pegawai pada tahun 2024 yaitu 98,64% atau Rp1.525.259.229,00 dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai Rp1.546.303.401.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tabel Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Pakai Habis	730.650.500,00	683.359.637,00	93,53
Belanja Jasa Kantor	1.500.602.132,00	1.313.927.255,00	87,56
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.844.000,00	9.524.168,00	80,41
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	285.847.500,00	252.464.750,00	88,32
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	26.800.000,00	20.000.000,00	74,63
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.042.800,00	95.762.479,00	99,71
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.406.000,00	209.193.217,00	62,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	2.999.192.932,00	2.594.231.506,00	86,50

Dari Tabel diatas pencapaian Belanja Barang dan Jasa penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa dengan Pagu Anggaran Rp2.999.192.932,00 realisasi sebesar Rp2.594.231.506,00 atau 86,50%. Dalam rekening Belanja Barang dan Jasa ini serapan belanja paling rendah yaitu Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, dari total Pagu anggaran Rp26.800.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 hal ini dikarenakan Harga belanja Sewa Gedung lebih rendah dari Pagu yang ditetapkan sehingga terdapat sisa Pagu yang cukup besar Rp6.800.000,00 atau 25,37% yang tidak terserap.



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi merupakan Belanja BPJS Kesehatan bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pagu Anggaran Rp11.844.000,00 pada awalnya direncanakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan 10 Tenaga Non ASN, akan tetapi ditahun berjalan terdapat 2 (Dua) Tenaga Non ASN diterima menjadi PPPK, sehingga Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang terserap sebesar Rp.9.524.168,00 atau 80,41% untuk 8 Pegawai Non ASN.
3. Belanja Sewa dan Peralatan dan Mesin dari total Pagu Rp285.847.500,00 merupakan Belanja Sewa hanya terealisasi Rp252.464.750,00 atau 88,32%. Pada Belanja Sewa dan Peralatan Mesin ini, hampir sama permasalahannya dengan belanja Sewa Gedung dan Bangunan, yaitu Pagu Anggaran yang ditetapkan lebih tinggi dari nilai Belanja Sewa.
4. Belanja Perjalanan Dinas, adapun Pagu Anggaran sebesar Rp337.406.000,00 ini terdiri dari Belanja transport peserta Pembinaan, Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (untuk kegiatan Pembinaan), Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Kegiatan Kursus/Diklat luar daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Forkopimda. Dari total Pagu Anggaran diatas realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp209.193.217,00 atau 62,00%. Adapun 38,00% sisa Pagu Anggaran Belanja Perjalanan Dinas ini sebagian besar adalah Belanja Perjalanan Dinas Forkopimda, yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini, dikarenakan beberapa anggota Forkopimda tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, karena ada ketugasan yang tidak dapat ditinggalkan.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah Belanja dalam bentuk Bantuan Keuangan yang diperuntukan kepada 8 Partai Politik Pemenang Pemilu dan Hibah Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Tabel Belanja Hibah

Belanja Hibah	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.054.880.000,00	29.054.880.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.137.463.168,00	1.137.463.168,00	100,00
Jumlah Belanja Hibah	30.192.343.168,00	30.192.343.168,00	100,00

Adapun Rincian untuk Hibah Bantuan Keuangan kepada Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp29.054.880.000,00 sebagai berikut :

Tabel Belanja Hibah Lembaga

No	Lembaga	Anggaran (Rp)
1	Komisi Pemilihan Umum Kab. Gunungkidul	22.821.266.000
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Gunungkidul	6.233.614.000
Jumlah Belanja Hibah Lembaga		29.054.880.000,00

Selanjutnya Rincian dari Bantuan Keuangan kepada 8 Partai Politik dari Pagu Anggaran sebesar **Rp1.137.463.168,00** sebagai berikut :

Tabel Belanja Hibah Partai Politik

No	Lembaga	Anggaran (Rp)
1	Partai PDIP	268.705.850
2	Partai Nasdem	209.173.314
3	Partai PAN	131.214.160
4	Partai Golkar	125.821.248
5	Partai Gerindra	107.274.342
6	Partai PKB	106.587.698
7	Partai PKS	95.831.946
8	Partai Demokrat	64.404.200
Jumlah Hibah Partai Politik		1.137.463.168



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Tabel Realisasi Tahap 1 dan Tahap 2 Bantuan Keuangan Partai Politik

No	Lembaga	Anggaran	Realisasi Tahap 1	Realisasi Tahap 2
1.	Partai PDIP	268.705.850	156.745.079	101.684.083
2.	Partai Nasdem	209.173.314	122.017.767	91.310.287
3.	Partai PAN	131.214.160	76.541.593	47.592.073
4.	Partai Golkar	125.821.248	73.395.728	65.082.908
5.	Partai Gerindra	107.274.342	62.576.700	57.751.814
6.	Partai PKB	106.587.698	62.176.157	71.591.199
7.	Partai PKS	95.831.946	55.901.969	41.675.824
8.	Partai Demokrat	64.404.200	37.569.117	13.850.871
	Jumlah	1.137.463.168	646.924.109	490.539.059

Penyerahan Bantuan keuangan Partai Politik diberikan 2 (dua) tahap dikarenakan mengikuti Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, sehingga penyerahan tahap 1 sesuai jumlah suara pemilu Tahun 2019 dan Tahap ke 2 menyesuaikan perolehan jumlah suara hasil pemilu serentak Tahun 2024 dan memperoleh 5 bulan. Hibah Bantuan Keuangan Partai politik tidak menggunakan NPHD karena sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri No 78 Tahun 2020 atas perubahan Permendagri No 36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

B. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pagu Anggaran Rp85.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp82.675.000,00 atau 97,26% yang terdiri dari belanja Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Megaphone dan Soundsystem) sebesar Rp12.575.000,00, sedangkan sebesar Rp72.100.000,00 terdiri dari Belanja Modal Personal Computer (Laptop dan Komputer) serta Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Scanner).

Belanja Modal	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.000.000,00	12.575.000,00	96,73
Belanja Modal Komputer Unit	72.000.000,00	70.100.000,00	97,36
Jumlah Belanja Modal	85.000.000,00	82.675.000,00	97,26



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Penjelasan Pos Pendapatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan SKPD yang tidak mengelola pendapatan oleh karena itu pendapatan disajikan dengan nilai Rp.0,00 :

2. Penjelasan Pos Beban

2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp34.349.467.082,69 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Realisasi	Realisasi
- Beban Pegawai	Rp 1.525.259.229,00	Rp 1.443.468.420,00
- Beban Barang dan Jasa	Rp 2.595.166.897,00	Rp 2.762.281.874,00
- Beban Hibah	Rp 30.192.343.168,00	Rp 20.478.931.758,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 36.697.788,69	Rp 81.044.441,63
	Rp 34.349.467.082,69	Rp 24.765.726.493,63

Adapun penjelasan rincian setiap beban adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.525.259.229,00 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(1) Beban Gaji dan Tunjangan	1.525.259.229,00	1.443.468.420,00
(2) Tambahan Penghasilan Pegawai	0,00	0,00
	1.525.259.229,00	1.443.468.420,00

1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban gaji dan tunjangan digunakan membayar gaji dan tunjangan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Gaji Pokok PNS	Rp 1.131.216.900,00
- Gaji Pokok PPPK	Rp 60.624.000,00
- Tunjangan Keluarga PNS	Rp 90.207.186,00
- Tunjangan Keluarga PPPK	Rp 2.915.976,00
- Tunjangan Jabatan PNS	Rp 80.180.000,00
- Tunjangan Fungsional PNS	Rp 58.880.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 25.785.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp 3.650.000,00
- Tunjangan Beras PNS	Rp 53.156.280,00
- Tunjangan Beras PPPK	Rp 2.245.020,00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 16.211.256,00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp 173.267,00
- Pembulatan Gaji PNS	Rp 13.142,00
- Pembulatan Gaji PPPK	Rp 1.202,00

Jumlah

Rp 1.525.259.229,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

b Beban Barang dan Jasa

1) Beban Bahan Habis Pakai

Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp249.220.660,00 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp	26.000,00	
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp	362.500,00	
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp	416.000,00	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	23.758.640,00	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp	9.235.000,00	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	-	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp	-	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp	14.790.000,00	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp	12.271.800,00	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	8.516.200,00	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Rp	165.851.820,00	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp	7.500.000,00	
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	416.000,00	
- Beban Obat-Obatan-Obat	Rp	6.076.700,00	
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	-	
- Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp	-	
- Beban Pakaian Olahraga	Rp	-	
- Beban Pakaian Paskibraka	Rp	-	
<i>Jumlah</i>			Rp 249.220.660,00
Jumlah Bahan Persediaan			Rp 249.220.660,00

Pada beban barang pakai habis terdapat selisih beban persediaan hal ini karena terdapat belanja non persediaan yang masuk ke dalam akun belanja persediaan, adapun rinciannya Penyesuaian Reklas Belanja sebagai berikut :

- Beban Bahan-bahan bangunan dan konstruksi berkurang sebesar **Rp5.542.500,00** terbagi kedalam beberapa akun beban sebagai berikut, Rp257.500,00 masuk kedalam Beban Bahan-bahan lainnya, Rp220.000,00 masuk ke Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian, Rp140.000,00 masuk ke Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik, Rp4.925.000,00 bukan merupakan persediaan melainkan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- Pada Beban Bahan-bahan lainnya terdapat Kapitalisasi dari realisasi sebesar **Rp61.500,00** bertambah dari Beban Bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp257.500,00 dan Berkurang ke Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebesar Rp196.000,00.
- Beban Alat/Bahan utk kegiatan kantor-ATK Bertambah **Rp3.295.140,00** diperoleh dari Beban Alat/bahan utk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp216.000,00 dan Beban Pakaian Paskibraka Rp3.079.140,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak berkurang menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar **Rp216.000,00**
- Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik bertambah dari Beban Bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp140.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp37.7241.777,00 serta Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp52.080.000,00 berkurang karena merupakan belanja non persediaan, dan dicatatkan dalam akun beban Beban Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp429.321.777,00.

2) Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp2.034.065.541,00 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
(1) Beban Jasa Kantor	1.744.076.623,00	1.820.007.641,00
(2) Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.524.168,00	0,00
(3) Beban Sewa Peralatan dan Mesin	252.464.750,00	36.600.000,00
(4) Beban Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	7.900.000,00
(5) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	2.000.000,00
(6) Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	14.500.000,00
Jumlah	2.034.065.541,00	1.881.007.641,00

Beban Jasa Kantor terdiri dari :

Beban Honorarium Narasumber atau	
- Pembahas Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 69.800.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana	
- Kegiatan dan Sekretariat Tim	Rp 781.125.000,00
Pelaksana Kegiatan	
- Beban Honorarium Rohaniwan	Rp 500.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan	
- Kegiatan Pendidikan	Rp 49.500.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 31.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan	
- Prasarana dan Sarana	Rp 950.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan	
- Kebudayaan	Rp 53.900.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp 210.137.500,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp 1.500.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 1.985.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp 5.200.000,00
- Beban Jasa Tenaga Supir	Rp -
- Beban Jasa Tata Rias	Rp 21.750.000,00
Beban Jasa Pelaksana Transaksi	
- Keuangan	Rp 27.500,00
- Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	Rp 25.225.500,00
- Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp 443.321.777,00
- Beban Jasa Pengolahan Sampah	Rp 600.000,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemetretan	Rp 5.000.000,00
- Beban Tagihan Telepon	Rp 301.892,00
- Beban Tagihan Air	Rp 2.474.010,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

- Beban Tagihan Listrik	Rp	37.328.444,00	
- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp	1.080.000,00	
- Beban Lembur	Rp	870.000,00	
Jumlah			Rp 1.744.076.623,00

Beban Jasa Penyelenggaraan Acara bertambah menjadi Rp443.321.777,00, karena ada mutasi dari Beban Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp37.7241.777,00 serta Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp52.080.000,00 yang merupakan belanja non persediaan, akan tetapi masuk pada akun Beban Jasa Penyelenggaraan Acara.

Beban Iuran Jaminan/Asuransi terdiri dari

- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp	9.524.168,00	
Jumlah			Rp 9.524.168,00

Beban Sewa Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- Beban Sewa Electric Generating Set	Rp	10.500.000,00	
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	151.736.000,00	
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp	4.500.000,00	
- Beban Sewa Mebel	Rp	67.728.750,00	
- Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	Rp	4.500.000,00	
- Beban Sewa Peralatan Studio Audio	Rp	7.500.000,00	
- Beban Sewa System/Power Supply	Rp	6.000.000,00	
Jumlah			Rp 252.464.750,00

Beban Sewa Gedung dan Bangunan terdiri dari :

- Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp	11.000.000,00	
- Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp	9.000.000,00	
Jumlah			Rp 20.000.000,00

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

- Beban Sewa Alat Musik	Rp	8.000.000,00	
Jumlah			Rp 8.000.000,00

3) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp102.687.479,00 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
(1) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 95.762.479,00	Rp 65.793.044,00
(2) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 4.925.000,00	Rp 22.795.000,00
(3) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 2.000.000,00	Rp -
Rp	102.687.479,00	88.588.044,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp4.925.000,00 yang diperoleh dari Beban Bahan-bahan bangunan dan konstruksi yang merupakan non persediaan, sehingga di lakukan reklasifikasi beban.

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-	Rp	63.376.979,00	
- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-	Rp	10.785.500,00	
- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan	Rp	300.000,00	
- RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik			
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan	Rp	12.300.000,00	
- Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			
Beban Pemeliharaan Komputer-	Rp	6.900.000,00	
- KomputerUnit-Personal Computer			
Beban Pemeliharaan Komputer-	Rp	2.100.000,00	
- Peralatan Komputer-Peralatan			
Jumlah			Rp 95.762.479,00

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Beban Pemeliharaan Bangunan	Rp	4.925.000,00	
- Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
Jumlah			Rp 4.925.000,00

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

Beban Pemeliharaan Barang Bercorak	Rp	2.000.000,00	
- Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak			
Jumlah			Rp 2.000.000,00

Jumlah Beban Pemeliharaan Rp 102.687.479,00

4) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp209.193.217,00 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Beban perjalanan dinas dalam daerah	Rp 51.273.217,00	Rp 72.233.289,00
- Beban perjalanan dinas luar daerah	<u>Rp 157.920.000,00</u>	<u>Rp 571.300.000,00</u>
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	Rp 209.193.217,00	Rp 643.533.289,00

5) Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp30.192.343.168,00 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirbala, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 29.054.880.000,00	Rp 19.369.919.000,00
- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 1.137.463.168,00	Rp 1.109.012.758,00
	Rp 30.192.343.168,00	Rp 20.478.931.758,00
Jumlah Beban Hibah		<u>Rp 30.192.343.168,00</u>

2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp36.697.788,69 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Realisasi	Realisasi
- Beban Penyusutan Alat Angkutan	Rp 4.713.142,80	Rp 44.355.357,15
- Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 2.485.582,90	Rp 8.605.646,51
- Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp -	Rp 300.000,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium	Rp 98.000,04	Rp 98.000,04
- Beban Penyusutan Komputer	Rp 2.072.916,71	Rp 357.291,69
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung	Rp 24.635.016,72	Rp 24.635.016,72
- Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 221.900,04	Rp 221.900,04
- Beban Penyusutan Bangunan Air	Rp 1.987.100,04	Rp 1.987.100,04
- Beban Penyusutan Jaringan	Rp 484.129,44	Rp 484.129,44
	Rp 36.697.788,69	Rp 81.044.441,63

Adapun penjelasan rincian setiap beban adalah sebagai berikut :

a. Beban Penyusutan Alat Angkutan

Beban Penyusutan Alat Angkutan Tahun 2024 sebesar Rp4.713.142,80 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:

- Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp -	
- Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 4.713.142,80	
Jumlah Beban Penyusutan Alat Angkutan		Rp 4.713.142,80

b. Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga

Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga Tahun 2024 sebesar Rp2.485.582,90 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:

- Beban Penyusutan Mebel	Rp 2.275.999,56	
- Beban Penyusutan Alat Pendingin	Rp -	
- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home)	Rp 209.583,34	
Jumlah Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga		Rp 2.485.582,90



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

c. Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
Pada Tahun 2024 tidak terdapat Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, karena pengeluaran atas manfaat ekonomis terakhir pada tahun 2023.			
d. Beban Penyusutan Alat Laboratorium			
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tahun 2024 sebesar Rp98.000,04 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:			
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	Rp	2.275.999,56	
<i>Jumlah Beban Penyusutan Alat Laboratorium</i>			Rp 2.275.999,56
e. Beban Penyusutan Komputer			
Beban Penyusutan Komputer Tahun 2024 sebesar Rp2.072.916,71 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:			
- Beban Penyusutan Personal Computer	Rp	1.112.500,00	
- Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	Rp	960.416,71	
<i>Jumlah Beban Penyusutan Komputer</i>			Rp 2.072.916,71
f. Beban Penyusutan Bangunan Gedung			
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tahun 2024 sebesar Rp24.856.916,76 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:			
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	Rp	24.856.916,76	
<i>Jumlah Beban Penyusutan Bangunan Gedung</i>			Rp 24.856.916,76
g. Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2024 sebesar Rp24.856.916,76 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:			
- Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	Rp	24.856.916,76	
<i>Jumlah Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti</i>			Rp 24.856.916,76
h. Beban Penyusutan Bangunan Air			
Beban Penyusutan Bangunan Air Tahun 2024 sebesar Rp1.987.100,04 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:			
- Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Rp	1.987.100,04	
<i>Jumlah Beban Penyusutan Bangunan Air</i>			Rp 1.987.100,04
i. Beban Penyusutan Jaringan			
Beban Penyusutan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp484.129,44 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2024 yang terdiri atas:			
- Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	Rp	468.929,40	
- Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah Tanah	Rp	15.200,04	
<i>Jumlah Beban Penyusutan Jaringan</i>			Rp 484.129,44



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Ekuitas Awal	Rp 1.622.085.812,37	Rp 1.693.271.268,00
b. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar	Rp -	Rp (3.277.777,00)
c. RK PPKD	Rp 34.394.508.903,00	Rp 24.697.818.815,00
d. Surplus/Defisit LO	Rp (34.349.467.082,69)	Rp (24.765.726.493,63)
Jumlah Ekuitas	Rp 1.667.127.632,68	Rp 1.622.085.812,37

a. Ekuitas Awal **Rp 1.622.085.812,37**

Ekuitas awal merupakan kekayaan bersih pemerintah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas awal tahun 2024 merupakan ekuitas pada Neraca akhir tahun 2023.

b. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar **Rp -**

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Dampak kumulatif perubahan mendasar.

c. RK PPKD **Rp 34.394.508.903,00**

Ekuitas RK PPKD dicatat menambah ekuitas karena untuk menutup Surplus/defisit LRA karena Pendapatan Asli Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih sedikit dibandingkan dengan belanja maka dicatat defisit LRA dan dicatat sebagai rekening penyeimbang surplus/defisit LO.

d. Surplus/Defisit LO **Rp (34.349.467.082,69)**

Defisit LO bersumber dari Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan beban operasi sebesar Rp34.349.467.082,69.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

B. PENJELASAN POS-POS NERACA

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013. Selanjutnya akun-akun dalam neraca akan dijelaskan termasuk perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Per tanggal 31 Desember 2024 juga telah dilakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan estimasi nilai sisa tidak dihitung atau nol rupiah. Untuk penyusutan tersebut juga telah dituangkan dalam Neraca dan daftar penyusutan terlampir dalam catatan atas laporan keuangan ini. Selanjutnya masing-masing rekening dalam neraca dijelaskan sebagai berikut:

B.1. ASET

1.1. ASET LANCAR **Rp1.671.031.396,68**

a. KAS DAN SETARA KAS **Rp0,00**

Saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1) Kas di Bendahara Penerima	0,00	0,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Kas	0,00	0,00

Per 31 Desember 2024 saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00. Sisa kas dari pencairan SP2D GU, TU dan LS telah disetorkan kembali ke Kas Daerah selama tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Adapun daftar setor kembali ke Kas Daerah adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	31 Desember 2024	Penyetoran kembali sisa Uang Persediaan Kas Tunai TA 2024 dari UP/GU	112.548.952,00
		TOTAL	112.548.952,00

b. PIUTANG **Rp0.00**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang tidak mengelola Piutang, oleh karena itu pendapatan disajikan dengan nilai nol.

c. PERSEDIAAN **Rp1.013.700,00**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dinas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	Audited (Rp)
a. Alat/bahan untuk kegiatan kantor	1.013.700,00	1.121.500,00
b. Obat - obatan	0,00	0,00
c. Persediaan untuk dijual/diserahkan	0,00	0,00
d. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga jaga	0,00	0,00
f. Natura dan pakan	0,00	0,00
g. Barang tak habis pakai	0,00	0,00
h. Barang bekas dipakai /komponen bekas dan pipa bekas	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	1.013.700,00	1.121.500,00

Pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2022 Audited saldo Persediaan sebesar Rp1.492.000,00. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp148.677.400,00 dan mutasi kurang sebesar Rp149.047.900,00 dengan rincian daftar persediaan yang terdapat pada lampiran 7.a, sehingga saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.121.500,00.

1.2.ASET TETAP Rp1.670.017.696,68

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	Audited (Rp)
ASET TETAP	Rp 1.670.017.696,68	Rp 1.624.040.485,37
2.1 Tanah	Rp 720.000.000,00	Rp 720.000.000,00
2.2 Peralatan dan Mesin	Rp 1.211.980.889,45	Rp 1.129.305.889,45
2.3 Gedung dan Bangunan	Rp 1.075.790.230,00	Rp 1.075.790.230,00
2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 39.988.194,00	Rp 39.988.194,00
2.5 Aset Tetap Lainnya	Rp 183.525.150,00	Rp 183.525.150,00
2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -
AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp (1.561.266.766,77)	Rp (1.524.568.978,08)
2.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp (1.116.079.204,32)	Rp (1.106.709.561,87)
2.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp (425.738.096,70)	Rp (400.881.179,94)
2.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp (19.449.465,75)	Rp (16.978.236,27)
Jumlah Aset Tetap	1.670.017.696,68	1.624.040.485,37

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.670.017.696,68 merupakan nilai buku Aset Tetap 31 Desember 2024, yang diperoleh dari Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2024, setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024. Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 diperoleh dari saldo Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 Audited ditambah belanja modal dan atau barang jasa yang bisa dikapitalisasikan menjadi aset tetap, serta mutasi kurang ke OPD lain .

- Tanah Rp720.000.000,00

Saldo awal per 31 Desember 2023 Audited **Tanah** sebesar Rp720.000.000,00 . Pada tahun anggaran 2024 tidak ada mutasi tambah dan kurang sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah tetap sebesar Rp720.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

- **Peralatan dan Mesin** **Rp1.211.980.889,45**
Saldo awal per 31 Desember 2023 Audited Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.129.305.889,45, pada tahun anggaran 2024 ada penambahan senilai Rp82.675.000,00 yang diperoleh dari Penambahan Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Megaphone dan Soundsystem) sebesar Rp12.575.000,00, dan Belanja Modal Personal Computer (Laptop dan Komputer) serta Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Scanner) sebesar Rp72.100.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 Rp1.211.980.889,45.
- **Gedung dan Bangunan** **Rp1.075.790.230,00**
Saldo awal per 31 Desember 2023 Audited **Gedung dan Bangunan** sebesar Rp1.075.790.230,00, pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat mutasi tambah dan kurang sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.075.790.230,00.
- **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** **Rp39.988.194,00**
Saldo awal per 31 Desember 2023 Audited **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** sebesar Rp39.988.194,00, pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat mutasi tambah dan kurang sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.988.194,00.
- **Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin** **(Rp1.116.079.204,32)**
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 Audited sesuai SIM Aset sebesar Rp1.106.709.561,87. Beban Penyusutan Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.369.642,45 Sehingga Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai SIM Aset adalah sebesar Rp1.116.079.204,32.

Saldo Audited 2023	Rp (1.106.709.561,87)
- Beban Penyusutan 2024	Rp (9.369.642,45)
Saldo Akumulasi penyusutan 2024	Rp (1.116.079.204,32)

Adapun rincian saldo akumulasi penyusutan tahun 2024 sesuai SIM Aset adalah sebagai berikut :

- Akumulasi Alat Angkutan	Rp 543.412.208,54
- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 326.779.272,37
- Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 54.889.054,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	Rp 490.000,12
- Akumulasi Penyusutan Komputer	Rp 190.508.669,29
Jumlah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin s/d Tahun 2023	Rp 1.116.079.204,32
- **Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan** **(Rp425.738.096,70)**
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 Audited adalah sebesar Rp400.881.179,94 sedangkan Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp24.856.916,76. Sehingga Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai SIM Aset adalah sebesar Rp425.738.096,70 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Audited 2023	Rp (400.881.179,94)
- Beban Penyusutan 2024	Rp (24.856.916,76)
Saldo Akumulasi penyusutan 2024	Rp (425.738.096,70)

Adapun rincian saldo akumulasi penyusutan tahun 2024 sesuai SIM Aset adalah sebagai berikut :

- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	Rp 424.184.796,58
- Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	Rp 1.553.300,12
Jumlah Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan s/d Tahun 2024	Rp 425.738.096,70



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp19.449.465,75)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2023 Audited adalah sebesar Rp16.978.236,27. Beban Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp2.471.229,48. Sehingga Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai SIM Aset adalah sebesar Rp19.449.465,75 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Audited 2023	Rp	(16.978.236,27)
- Beban Penyusutan 2024	Rp	(2.471.229,48)
Saldo Akumulasi penyusutan 2024	Rp	(19.449.465,75)

Adapun rincian saldo akumulasi penyusutan tahun 2024 sesuai SIM Aset adalah sebagai berikut :

- Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	Rp	15.896.800,12
- Akumulasi Penyusutan Jaringan	Rp	3.552.665,63
Jumlah Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan s/d Tahun 2024	Rp	19.449.465,75

- Aset Tetap Lainnya Rp183.525.150,00

Saldo awal per 31 Desember 2023 Audited *Aset Tetap Lainnya* sebesar Rp183.525.150,00 yang terdiri dari Buku sebesar Rp435.000,00, Barang Bercorak Kebudayaan (alat Musik) sebesar Rp183.090.150,00, Pada tahun anggaran 2024 tidak ada mutasi tambah dan kurang sehingga saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 tetap sebesar Rp183.525.150,00.

1.3.ASET LAINNYA

Rp12.990.977,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	Audited (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	12.990.977,00	17.990.977,00
Jumlah Aset Lainnya	12.990.977,00	17.990.977,00

- Aset Lain-lain Rp12.990.977,00

Saldo awal per 31 Desember 2023 Audited *Aset Lain-lain* sebesar Rp17.990.977,00. terdapat mutasi penghapusan Aset Rusak Berat/Usang berupa Kendaraan Beroda Dua sebesar Rp5.000.000,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 Aset Lain-lain adalah tetap sebesar Rp12.990.977,00.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN***Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul****ASET EKSTRAKOMTABEL**

Saldo awal Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.289.047,62 pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang, sehingga saldo Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2024 adalah tetap sebesar Rp29.289.047,62 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Per 31 Des 2023	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2024
Peralatan Mesin :	28.792.247,62	0,00	28.792.247,62
1. Alat-alat Berat/Besar	0,00	0,00	0,00
2. Alat-alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
3. Alat-alat Bengkel	0,00	0,00	-
4. Alat Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
5. Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	28.792.247,62	0,00	28.792.247,62
6. Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	-
7. Alat Ukur	0,00	0,00	-
8. Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
9. Alat-alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
10. Alat-alat Keamanan	0,00	0,00	0,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	300.000,00	-	300.000,00
1. Bangunan Gedung	0,00		-
2. Tugu Titik Kontrol/Pasti	300.000,00		300.000,00
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00
1. Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
2. Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00
3. Instalasi	0,00	0,00	0,00
4. Jaringan	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP LAINNYA	196.800,00	0,00	196.800,00
1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
3. Aset Lain-Lain	196.800,00	0,00	196.800,00
4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	29.289.047,62	-	29.289.047,62

B.2. PENJELASAN POS-POS KEWAJIBAN**Rp3.903.764,00****2.1.KEWAJIBAN Rp 3.903.764,00**

Per 31 Desember 2024 Kewajiban berupa Utang Belanja Jasa. pada tahun 2024 kewajiban terdiri dari mengalami perubahan karena ada utang belanja listrik, utang belanja telepon, utang belanja air masing-masing dirinci sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
3.903.764,00	2.971.173,00
3.903.764,00	2.971.173,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Kewajiban Jangka Pendek Rp 3.903.764,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Utang Belanja Pegawai		
- Utang belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00
b. Utang belanja jasa:		
- Utang belanja listrik	3.761.762,00	2.861.337,00
- Utang belanja telepon	48.232,00	25.366,00
- Utang belanja air	93.770,00	189.470,00
		0,00
Jumlah Kewajiban	3.903.764,00	3.076.173,00

B.3. EKUITAS Rp 1.667.127.632,68

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
EKUITAS	1.667.127.632,68	1.622.085.812,37
Jumlah Ekuitas	1.667.127.632,68	1.622.085.812,37

Ekuitas Rp 1.667.127.632,68

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023, disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Ekuitas Awal	Rp 1.622.085.812,37	Rp 1.693.271.268,00
b. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar	Rp -	Rp (3.277.777,00)
c. Surplus/Defisit LO	Rp (34.349.467.082,69)	Rp (24.765.726.493,63)
d. RK PPKD	Rp 34.394.508.903,00	Rp 24.697.818.815,00
Jumlah Ekuitas	Rp 1.667.127.632,68	Rp 1.622.085.812,37

a) Ekuitas Rp 1.667.127.632,68

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas	1.667.127.632,68	1.622.085.812,37
Jumlah	1.667.127.632,68	1.622.085.812,37



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

Jumlah ekuitas mutasi per 31 Desember 2024 Rp1.667.127.632,68 berasal dari mutasi aset yang masuk diakui menambah ekuitas dan mutasi keluar diakui mengurangi ekuitas. Ekuitas mutasi tersebut yang dapat dijelaskan dalam buku besar ekuitas sebagai berikut :

MUTASI EKUITAS

URAIAN	DEBIT (Rp.)	KREDIT (Rp.)	SALDO (Rp.)
1 Ekuitas Awal	-	1.622.085.812,37	1.622.085.812,37
2 Mutasi Aset dari OPD Lain	-	0,00	1.622.085.812,37
3 Mutasi Aset BTT		0,00	1.622.085.812,37
4 Mutasi Persediaan		0,00	1.622.085.812,37
5 Penyesuaian Akumulasi kode barang	-	0,00	1.622.085.812,37
6 Koreksi Ekuitas Lainnya		0,00	1.622.085.812,37
7 Mutasi kurang ATB	-	0,00	1.622.085.812,37
8 Koreksi Tahun ATB		0,00	1.622.085.812,37
9 Penutup LRA		34.394.508.903,00	36.016.594.715,37
10 Surplus defisit LO	34.349.467.082,69	-	1.667.127.632,68
Jumlah	- 34.349.467.082,69	36.016.594.715,37	1.667.127.632,68

b) Surplus/Defisit LO Rp 34.349.467.082,69

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus/Defisit LO	34.349.467.082,69	24.765.726.493,63
Jumlah	34.349.467.082,69	24.765.726.493,63

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Karena Pendapatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih tidak memiliki pendapatan , maka LO bernilai negatif (defisit).

c) RK PPKD Rp 34.394.508.903,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
RK PPKD	34.394.508.903,00	24.697.818.815,00
Jumlah RK PPKD	34.394.508.903,00	24.697.818.815,00

RK PPKD adalah rekening kas pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan jumlah anggaran yang telah dicairkan dalam SP2D yang telah diterima di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dikurangi setoran kembali ke Kas Daerah atas sisa belanja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rekening Kas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.394.508.903,00



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul adalah struktur kelembagaan yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. pelaksanaan pembinaan ideologi;
5. pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional;
6. pelaksanaan pembinaan dan pendidikan politik dalam negeri;
7. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
8. pengkajian permasalahan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa dan politik;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
12. pengelolaan UPT.

Dalam hal pengelolaan aset, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan;



Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul

pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan aset dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan optimalisasi dari aset yang ada untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam hal pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022.

B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kepala	: Johan Eko Sudarto, S.Sos.MH
Sekretaris	: Ahmad Ahsan Jihadan, S.Psi.,M.A
Kepala Sub Bagian Umum	: Sulastri, S.Sos.
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	: Diana Estilestari, S.Sos, MAP
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	: Nani Asyfhah, S.Sos,M.Si
Subkoordinator/Fungsional Muda Bina Ideologi	: Liliestiani, S.Sos
Subkoordinator/Fungsional Muda Kewaspadaan Dini	: -
Subkoordinator/Fungsional Muda Penanganan Konflik	: Basirahayu, S.IP.MAP
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	: Sumarto, S.Pd.,M.M
Subkoordinator/Fungsional Muda Politik Dalam Negeri	: Widodo, S.H.
Subkoordinator/Fungsional Muda Organisasi Kemasyarakatan	: Purwo Handoko, S.Sos.MM



BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Laporan ini telah disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Laporan keuangan juga telah disusun sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Laporan Keuangan ini telah berusaha menyajikan informasi secara memadai dan lengkap (*full disclosure*) yaitu pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan dan informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini menyajikan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas posisi per 31 Desember 2024 dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta lampiran yang diperlukan sebagai penjelasan yang lebih rinci, kesemuanya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain.

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD bagi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Harapannya Laporan Keuangan ini dapat dijadikan sumber informasi yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan dan berguna bagi Lembaga Pemeriksa dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Gunungkidul, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN

JOHAN EKO SUDARTO,S.Sos.,M.H

NIP. 19710912 199101 1 001